Huma: Jurnal Sosiologi
ISSN 2988-5795

Volume 2, Nomor 3 (2023)

BIAS CAHAYA: PARADOKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DIFABEL NETRA DI KOTA BANJARBARU

Cherry Rabiullan Sari[1], Ismar Hamid[1]
[1]*Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

Corresponding author:
Cherry Rabiullan Sari
Email:
cherryrabiullans@gmail.com

Keywords:
Disability; empowerment; empowerment strategy; empowerment principles

Article History:
Received: August 28, 2023
Accepted: October 23, 2023

DOI: https://doi.org/10.20527/h-js.v2i3.104

ABSTRAK

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara dan Kompleks Disabilitas Kota Banjarbaru melaksanakan program pemberdayaan bagi kaum difabel netra di Kota Banjarbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan strategis yang diterapkan, serta keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh kedua lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di dua lokasi yang berbeda. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan difabel netra dari kedua lembaga tersebut belum mencapai tingkat berdaya yang ideal. Pendekatan strategis yang diterapkan oleh kedua lembaga tersebut mencakup lingkup *enabling* dan *empowering*, sedangkan lingkup *protecting* belum begitu nampak. *Enabling* atau menumbuhkan iklim berdaya dilakukan dengan cara penyediaan ruang literasi, penyebarluasan informasi, menjalin kemitraan dengan sektor pemerintah dan swasta. Wujud *empowering* dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan bidang produksi dan pengemasan, sumber daya manusia, serta teknologi. Program-program pemberdayaan yang dilakukan kedua lembaga tersebut mampu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan para difabel netra untuk berdaya dan mandiri, serta berimplikasi pada peningkatan pendapatan pada sebagian difabel netra yang mau diberdayakan. *Protecting* atau upaya dalam melindungi belum begitu nampak, disebabkan masih tercipta persaingan usaha yang tidak seimbang di kedua lembaga tersebut. Selama ini pendekatan yang digunakan YKTN dan Pertuni tidak selalu mampu meningkatkan kualitas hidup difabel netra, akan tetapi justru menjadikan mereka malas untuk mendayagunakan dirinya menjadi lebih baik. Sikap derma yang diberikan oleh masyarakat kepada difabel netra menjadikan sebagian besar dari mereka semakin nyaman hidup di jalanan dengan terus meminta-minta. Realita tersebut merupakan wujud paradoks pemberdayaan difabel netra di Kota Banjarbaru.

ABSTRACT

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara and the Kompleks Disabilitas Banjarbaru are implementing empowerment programs for the visually impaired community in Banjarbaru City. This study aims to analyze the strategic approaches applied and the successes achieved by both institutions. This research uses a qualitative approach with a case study research design in two different locations. Data collection techniques include participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that the empowerment programs for the visually impaired community from both institutions have not reached an ideal level of empowerment. The strategic approaches applied by both institutions include enabling and empowering approaches, while protecting approaches are not yet evident. Enabling or fostering an empowered climate is done through the provision of literacy spaces, information dissemination, and partnerships with the government and private sectors. Empowering activities are carried out through coaching and training in production and packaging, human resources, and technology. The empowerment programs carried out by both institutions have been able to increase the confidence and skills of visually impaired people to be self-reliant, which has resulted in increased income for some of those who have been empowered. However, protective efforts are not yet evident due to the unequal business competition that exists in both institutions. The approach used by YKTN and Pertuni has not always been able to improve the quality of life for blind people, but instead has made them lazy to make better use of themselves. The attitude of charity given by the community to the blind has made most of them more comfortable living on the streets by continuing to beg. Thus, there was a paradox of empowerment in the city of Banjarbaru

Copyright © 2023 by The Authors

OPEN ACCESS

How to Cite:
Sari, C. R. & Hamid, I. (2023). Bias Cahaya: Paradoks Pemberdayaan Masyarakat Pada Difabel Netra di Kota Banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi,* 2(3), 213-222. https://doi.org/10.20527/h-js.v2i3.104

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Namun, ada keunikan yang seringkali dianggap kekurangan atau keterbatasan, yang biasa disebut disabilitas. Berbagai pertimbangan membuat penyebutan disabilitas berubah menjadi difabel, sebagai pengakuan kemampuan berbeda yang dimiliki penyandang disabilitas. *Different ability* merupakan singkatan dari difabel, yang artinya kemampuan yang berbeda. Perubahan penyebutan tersebut sebagai apresiasi terhadap penyandang disabilitas atas kemampuan yang dimilikinya. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Helmayuni, 2021), meletakkan penyandang disabilitas sebagai subjek (individu) yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Menurut Reefani dalam Kemenpppa (2019), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yakni: 1) disabilitas mental, yaitu individu yang memiliki kelainan mental; 2) disabilitas fisik, yaitu individu yang memiliki kelainan fisik; 3) disabilitas ganda, yaitu individu yang memiliki lebih dari satu jenis keluarbiasaan. Berdasarkan data dari Kemensos (2020), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 212.116 jiwa dan terdapat 622 jiwa penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru.

Masalah utama yang seringkali dihadapi oleh kaum difabel adalah kerap kali mengalami tindakan diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, pelecehan, *bullying*, dan lain-lain (Yemima & Hamid, 2023). Masalah lain adalah *stereotype* tidak bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupannya. Di Kota Banjarbaru banyak difabel netra yang kemudian menjadi pengemis di pinggir jalan. Sehingga berujung pada menguatnya fenomena eksklusi terhadap kaum difabel di Kota Banjarbaru. Para difabel netra harus menghadapi *stereotype* untuk mendapatkan lingkungan sosial yang setara dengan masyarakat non-difabel. Lahirnya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir fenomena eksklusi pada kaum difabel netra. Namun, upaya tersebut masih menjadi bias solusi untuk permasalahan tersebut, sebab belum adanya *progress* yang signifikan dalam pengurangan kaum difabel netra yang mengemis di tepi jalan Kota Banjarbaru.

Terdapat dua lembaga yang memberdayakan kaum difabel netra di Kota Banjarbaru, yaitu Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Banjarbaru. Lebih dari 100 difabel netra menjadi penerima manfaat program pemberdayaan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Anggota Pertuni telah menjadi sasaran pemberdayaan melalui pembangunan kompleks disabilitas yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dari Divisi Kesra (Kesejahteraan Rakyat). (Ferardy, 2018), mengemukakan proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan tidak mengabaikan asas-asas demokrasi, hal ini sejalan dengan peran Pertuni. (Qasthari, 2017), mengemukakan bahwa model pemberdayaan dalam sebuah komunitas disabilitas dapat diwujudkan dalam kegiatan seperti pendampingan. (Islan, 2021), menjelaskan bahwa peran Pertuni adalah memberikan motivasi agar kaum

Copyright © 2023 by The Authors
OPEN ACCESS

difabel netra lebih semangat dan percaya diri dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Tahap akhir dari peran Pertuni adalah kemandirian dari penyandang tunanetra yang sudah mampu mendapat penghasilan.

Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap difabel netra yang kurang lebih sama dengan Pertuni. Namun, YKTN tidak sepakat bahwa program pembangunan kompleks disabilitas mampu membuat para difabel netra lebih mandiri, sebab yang terjadi adalah meningkatnya fenomena eksklusi atas difabel netra yang hanya dijadikan obyek penerima bantuan dari para donator sejak adanya komplek tersebut.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pendekatan pemberdayaan masyarakat pada kedua lembaga tersebut dalam upaya menciptakan perubahan sosial, yakni membantu kaum difabel menghadapi *stereotype* hingga mendapatkan lingkungan sosial yang setara dengan masyarakat non-difabel. (Soemodiningrat, 2002), memaparkan bahwa upaya memberdayakan masyarakat bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu: (1) menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dalam hal ini sangat diperlukan langkah lebih dan tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana. Diperlukan penguatan, penyediaan berbagai masukan (*input*), pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat membuat masyarakat menjadi berdaya; (3) pemberdayaan mengandung arti melindungi, yakni mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Program pemberdayaan yang ideal dapat diamati dari berbagai aspek. Menurut (Najiyati, 2014), terdapat empat prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu: 1) prinsip kesetaraan, yakni adanya kesetaraan atau kedudukan yang sama antara sasaran pemberdayaan dengan pihak yang melakukan pemberdayaan; 2) prinsip partisipasi, yakni program yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh seluruh pihak; 3) prinsip keswadayaan atau kemandirian, yakni program yang dijalankan mampu menciptakan masyarakat yang tidak bergantung pada pihak lain; 4) prinsip berkelanjutan, yakni proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Program pemberdayaan juga dilihat dari pendekatan strategisnya. Menurut Hanna dan Robinson dalam (Hamid & Meilinda, 2023), terdapat 3 strategi pemberdayaan, yaitu: 1) strategi tradisional, yakni menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan; 2) strategi *direct-action* (aksi langsung), yakni strategi yang membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat; dan 3) strategi transformatif, yakni mendudukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat pada kaum difabel netra yang diterapkan oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Banjarbaru di Kompleks Disabilitas, serta menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat pada kaum difabel netra yang yang diterapkan. Nilai kebaruan dari penelitian ini adalah adanya perspektif baru yang menjadi input dalam rangka menemukan pendekatan pemberdayaan yang lebih ideal bagi para difabel netra dan mampu mendukung pembangunan kota inklusif.

Copyright © 2023 by The Authors

OPEN ACCESS

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana strategi program pemberdayaan masyarakat pada penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah studi kasus, yakni melakukan eksplorasi lebih dalam terhadap program, proses atau aktivitas terhadap satu orang atau lebih (Sugiyono, 2018). Instrumen yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara dan Kompleks Disabilitas Kota Banjarbaru. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan program pemberdayaan difabel netra secara menyeluruh di Kota Banjarbaru. Seluruh tahapan penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 – Maret 2023. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif miles dan huberman, yang terdiri dari reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2020).

C. PEMBERDAYAAN KAUM DIFABEL NETRA DI KOTA BANJARBARU

Pemberdayaan difabel khususnya penyandang difabel netra terbilang masih sangat bias di Kota Banjarbaru. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kaum difabel netra yang merasa belum terpenuhi haknya. Upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Disadari pula adanya berbagai bias dalam implementasi pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Beberapa pemberdaya masih cenderung berpikir bahwa dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (*grassroot*). Sehingga para kaum difabel netra hanya dijadikan objek pembangunan bukan sebagai subjek. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang diambil untuk pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata di kehidupan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan, kaum difabel netra masih dianggap masyarakat tingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.

1. Program-program Kompleks Disabilitas Tunanetra Kota Banjarbaru

Program-program yang ada di Kompleks Disabilitas ini merupakan program rutin yang diadakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan dijalankan oleh para warga di kompleks tersebut. Adapun program tersebut, yang masih berlangung hingga sekarang, adalah: 1) *Pembelajaran/latihan syair-syair Maulid*, yakni kegiatan membacakan atau melagukan kitab maulid; 2) *Pembelajaran baca Al-Qur'an braille*, yang merupakan salah satu program unggulan di Kompleks Disabilitas Kota Banjarbaru karena dilaksanakan rutin dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kaum difabel dalam membaca Al-Qur'an; 3) *Berkebun*, yang merupakan program yang dibuat untuk menyadarkan difabel netra perihal keberlanjutan dalam menjaga lingkungan; 4) *Produksi telur asin*, yang merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kaum difabel netra di Kompleks Disabilitas; 5) *Pijat*, merupakan program unggulan yang berorientasi meningkatkan keterampilan kaum difabel netra untuk berwirausaha secara mandiri.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kompleks Disabilitas dalam hal ini Pertuni telah mencakup lingkup strategis *enabling*. Menurut (Soemodiningrat,

Copyright © 2023 by The Authors
OPEN ACCESS

2002), *enabling* adalah menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Program-program yang dilaksanakan telah menciptakan pengenalan bahwa setiap manusia mampu berdaya dan berkembang. Walau tidak menyeluruh namun program-program tersebut telah mampu mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dirinya. Salah satunya melalui program pendidikan, khususnya pendidikan agama. Program-program Pertuni banyak bergerak pada bidang pendidikan dalam lingkup keaksaraan yang berorientasi pada pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan-dasar). Kegiatan pelatihan yang lain juga dilakukan agar mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Program Maulid Habsyi merupakan program penyadaran dalam keagamaan kepada Kaum Difabel Netra di Kompleks Disabilitas. Kompleks Disabilitas (Pertuni) juga telah mengimplementasikan program dalam lingkup *empowering.* Memperkuat potensi yang dimiliki kaum difabel netra melalui peningkatan kapasitas, tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana.

Program YKTN dan Pertuni berjalan tanpa mengabaikan prinsip pemberdayaan kesetaraan dan partisipatif. Namun, sayangnya program-program yang berhasil hingga tahap *empowering* tersebut tidak berkelanjutan. Program tersebut berhenti disebabkan kurangnya partisipasi Pemerintah Kota Banjarmasin, fasilitator dan beberapa mitra yang tidak memberikan pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan program tersebut. Hal ini dibuktikan dari program berkebun yang hanya digaungkan saat acara seremonial Pemerintah Kota Banjarbaru. Secara tidak langsung, program ini hanya menjadi pemanis politik. Selain berkebun, program yang mampu meningkatkan potensi dan daya para difabel netra adalah produksi telur asin namun tidak berkelanjutan, sehingga hal ini sangat disayangkan. Program-program tersebut belum mencapai lingkup *protecting*, karena belum ada antisipasi persaingan antar difabel netra. Hal ini dapat dilihat dari program pijat yang mana seluruh difabel netra yang tinggal di kompleks disabilitas tersebut bermata pencaharian pijat. Sehingga menghasilkan persaingan pijat yang cukup kompleks antar difabel netra.

Pada akhirnya, muncul kesalaan dalam memahami lingkup *protecting* pada program pembangunan Kompleks Disabilitas yang dihuni organisasi Pertuni. (Soemodiningrat, 2002), menjelaskan bahwa upaya *protecting* dalam pemberdayaan adalah mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kerdil atau melemahkan yang lemah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah difabel netra. Seharusnya, melindungi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung dengan pemberian *(charity*). Pembangunan kompleks Disabilitas juga menimbulkan beberapa stigma baru yang bertolak belakang dengan pengertian inklusif itu sendiri. Dengan adanya kompleks yang berbeda dan jauh dari masyarakat umum, maka hal ini menjadikan kompleks disabilitas ekslusif.

2. Program-Program Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara Kota Banjarbaru

Program yang ada di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara, sebagai berikut: 1) *Pelatihan TI,* merupakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kemampuan pengelolaan Teknologi Informasi; 2) *Pelatihan Al-Qur'an braille*, merupakan program untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kaum difabel netra dalam membaca Al-Qur'an; 3) *Budi daya ikan*, merupakan program yang membantu mengembangkan

Copyright © 2023 by The Authors
OPEN ACCESS

perilaku dan kemampuan berwirausaha mandiri; 4) *Pengemasan kerupuk*, merupakan program membantu mengemas kerupuk yang telah diolah untuk dijual; 5) *Pijat*, yakni program unggulan yang berorientasi meningkatkan keterampilan kaum difabel netra untuk berwirausaha secara mandiri.

Secara garis besar Program yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Program-program YKTN (Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara) mampu memberikan pandangan setara antara difabel netra dengan non-difabel netra. Program YKTN sudah mencakup tahap *enabling*, seperti Program RTI (Rumah Tunanetra Indonesia) yang mampu mengubah pandangan para tunanetra untuk terus mau berinovasi menciptakan karya baru. Program pelatihan TI (Teknologi Informasi) dalam RTI (Rumah Tunanetra Indonesia) ini mengembangkan kreativitas sekaligus menyatukan yang tidak kenal menjadi kenal. Secara tidak langsung para tunanetra tersebut termotivasi sehingga tidak merasa sendiri. Program itupun mampu memicu rasa keberanian karena dalam RTI terdapat penyandang Tunanetra dari berbagai daerah.

Proses *enabling* cukup berhasil walaupun hanya melalui dunia virtual. Dengan komunikasi yang bagus maka orang-orang yang menggunakannyapun akan berani mencoba dan berkomunikasi. Namun, YKTN belum memberikan pelatihan secara massif dan rutin kepada para tunanetra yang ingin belajar membuat aplikasinya. Hal itu disebabkan karena kurangnya sumber dana dan keterbatasan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia sebagai *trainer*. Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) juga pernah mencoba untuk mengadakan pelatihan *braille door to door*, namun kurang efektif dikarenakan cukup lambat. Setidaknya dengan mengumpulkan dua puluh lima netra dan diajari oleh satu atau dua orang guru maka pemberdayaan tersebut dapat berjalan lancar. Sama halnya dengan pemberdayaan di bidang pendidikan, yakni pelatihan huruf *braille*, yang mana sudah terdapat banyak tutorial di youtube yang bisa diimplementasikan. Alhasil, program ini hanya sampai pada tahap *enabling*, dimana suasana atau iklim itu tercipta namun tidak memiliki proses *empowering* yang berkelanjutan. (Soemodiningrat, 2002), menyatakan bahwa memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) sangat diperlukan, tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana. Diperlukan penguatan, penyediaan berbagai masukan (*input*), pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Pemberdayaan Difabel Netra Dalam Tinjauan Teori Pemberdayaan

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan kaum difabel netra pada Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Kompleks Disabilitas Kota Banjarbaru kurang lebih sama. Setiap program yang dibuat tidak memiliki pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan kegiatan. Rumusan strategi yang dibuat belum sepenuhnya memperhatikan kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancamannya. Sebenarnya, para difabel netra di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara dan Pertuni lebih maju dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, ketimbang fasilitator itu sendiri. Namun, hanya sebagian difabel netra yang mampu membangun pemahaman dan komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat. Selain itu, para difabel netra yang tergabung dalam Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) lebih siap dalam

Copyright © 2023 by The Authors
OPEN ACCESS

menyebarkan system informasi melalui Radio Tunanetra Indonesia guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait program-program yang dijalankan.

Dari sudut pandang strategi pemberdayaan, Hanna dan Robinson dalam (Hamid & Meilinda, 2023), mengemukakan bahwa terdapat 3 strategi pemberdayaan, yaitu: 1) strategi tradisional, yakni menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan; 2) strategi *direct-action* (aksi langsung), yakni strategi yang membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat; dan 3) strategi transformatif, yakni mendudukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri.

Para difabel netra yang diberdayakan belum memiliki kebebasan dalam menentukan program yang membuat mereka lebih berdaya. Idealnya, program pemberdayaan masyarakat menerapkan strategi transformatif yang menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengindentifikasian kepentingan diri sendiri. Program-program yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru terlihat masih menerapkan strategi *direct-action*. Strategi yang masih tunduk pada dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pengaruh pihak Pemerintah Kota Banjarbaru masih sangat kuat dalam pengambilan keputusan.

4. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Najiyati, 2014), terdapat empat prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipatif, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan. Program yang telah dirancang untuk kaum difabel netra di Kota Banjarbaru telah menerapkan prinsip kesetaraan dan keswadayaan. Para difabel netra telah mampu membangun kemandirian tanpa menunggu atau selalu mengharapkan dukungan pihak luar. Selain itu, para difabel netra melaksanakan program untuk seluruh elemen masyarakat tanpa membeda-bedakan gender, suku, ras dan agama. Namun, Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip partisipatif. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan seluruh stakeholders dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dari prinsip partisipatif, terlihat bahwa pemberdayaan dari kedua lembaga tersebut belum cukup efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. Contohnya, pada program produksi kerupuk, pengurus inti Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) belum mampu mengajak para anggota tunanetra untuk ikut berdagang, karena bagi para tunanetra tersebut "duduk di pinggir jalan" untuk mengemis atau meminta-minta lebih menguntungkan. Pada program lain, seperti program pelatihan *braille*, yang diadakan oleh Kesra Pemko Banjarbaru, para difabel netra yang berada di Kompleks Disabilitas hanya datang dan mengikuti kegiatan jika diberi uang transport. Hal tersebut diakui sendiri oleh para difabel netra, yang selalu menanyakan tentang uang transport setiap diajak mengikuti kegiatan. Realita tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemandirian belum mampu diterapkan.

Dari prinsip mandiri/swadaya, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kedua lembaga tersebut tidak secara menyeluruh mampu mengupayakan kemandirian kepada para anggota. Masih banyak penanganan yang salah, dimulai dari keberadaan

Copyright © 2023 by The Authors
OPEN ACCESS

Kompleks Disabilitas yang diiming-imingi berbagai fasilitas gratis membuat para difabel netra hanya menjadi objek pemberdayaan, bukan sebagai subjek. Kompleks tersebut dipisahkan jauh dari perumahan yang lain, dan para difabel netra selalu diberikan uang transport setelah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bnajarbaru. Hal yang kurang lebih sama terjadi di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN), berbagai program yang dibuat beberapa hanya seputar permohonan donasi untuk anggota mereka sendiri dengan dalih membantu para difabel netra untuk bekerja secara mandiri.

Dari prinsip berkelanjutan, terlihat bahwa kedua lembaga tersebut memang memiliki rencana program yang berkelanjutan, namun pada realitanya tidak demikian. Sehingga beberapa program, seperti budidaya ikan, berkebun, dan pembuatan telur asin, tidak berhasil dijalankan terus menerus. Program itu hanya berjalan beberapa bulan disebabkan karena faktor dana yang terhambat, sumber daya manusia yang kurang, juga fasilitas yang belum memadai dan proses adaptasi terhadap kebiasaan baru yang cukup lambat untuk para difabel netra di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, berbagai macam program tersebut hanya menjadi sebuah pembicaraan tanpa aksi berkelanjutan. Hanya beberapa program yang masih berkelanjutan, yakni usaha pijat, produksi kerupuk dan beberapa program di bidang pendidikan yang mampu dilakukan dengan dana yang kecil dan sumber daya manusia yang tidak terlalu banyak.

5. Paradoks Pemberdayaan Masyarakat Difabel Netra

Program pemberdayaan yang harusnya berkarakteristik *people-centered*, pada kenyataannya yang dilakukan oleh kedua lembaga sosial di Kota Banjarbaru masih berkarakteristik *basic needs*. Program yang dilaksanakan masih berfokus pada pelayanan *basic needs* dan bukan *human empowering* (pemberdayaan). Program pemberdayaan seharusnya memiliki nilai dengan menjadikan manusia sebagai subyek pemberdayaan, bukan hanya sebagai obyek. Selain itu, pembangunan *people-centered* secara nyata seharusnya memperkuat hubungan manusia dengan seluruh sumber daya yang ada, bukan hanya sebagai indikator keberhasilan program pemerintah saja. Kendala dalam program ini adalah keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat, yang tentu saja bertolak belakang dengan kebutuhan implementasi pembangunan *people-centered* yang harus didukung dengan struktur dan prosedur yang memadai.

Hadirnya kompleks disabilitas yang diharapkan mampu membangun kota yang Inklusif, yaitu kota yang masyarakatnya dapat menyesuaikan perbedaan yang ada di sekitarnya. Pada kenyataannya, pembangunan kompleks itu menciptakan fenomena eksklusif di Kota Banjarbaru, masyarakat difabel netra terisolasi dan kesulitan berinteraksi langsung dengan masyarakat non-difabel netra sehingga menjadi saling membatasi diri dan menutup diri satu sama lain. Hal itu disebabkan karena pembangunan kompleks yang tidak menggunakan pendekatan khusus terlebih dahulu dengan penerima manfaat, yaitu difabel netra. Akses mobilitas para difabel netra cukup sulit untuk melakukan berbagai aktivitas di luar kompleks. Begitupun dengan para difabel netra Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Nusantara (YKTN) yang dianggap hanya memiliki kemampuan memijat dan mengamen sehingga membuat para difabel netra merasa kurang percaya diri untuk mandiri.

Idealnya, program pemberdayaan menerapkan strategi transformatif yang ditunjukkan dengan adanya pendidikan massa dalam jangka panjang sebelum pengindentifikasian kepentingan secara mandiri oleh masyarakat yang diberdayakan.

Copyright © 2023 by The Authors

OPEN ACCESS

Program-program yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru masih menerapkan strategi *direct-action*, yang mendudukkan dominasi kepentingan yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Pada pemberdayaan difabel netra di Kota Banjarbaru pihak pemerintahlah yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

D. KESIMPULAN

Program yang dilaksanakan oleh Pertuni di Kompleks Disabilitas belum sesuai dengan harapan yang dibangun atas cita-cita Kota Banjarbaru untuk menjadi kota inklusif. Program pemberdayaan yang dilakukan belum bisa dianggap berkelanjutan dan cenderung mengarah pada permohonan bantuan *(basic needs)*. Para difabel netra belum seluruhnya memiliki kepercayaan diri atau berani untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masih menimbulkan stereotip akibat dari aktifitas mengamen atau duduk mengemis di pinggir jalan Kota Banjarbaru. Selain itu, kedudukan para difabel netra belum setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain karena program yang dirancang cenderung menjadikan difabel netra sebagai objek penerima bantuan, obyek politik, dan lain-lain. Tahapan dan pendekatan pemberdayaan yang kurang tepat menciptakan *paradoks* pemberdayaan yang akhirnya menempatkan para difabel netra tetap berada dalam keadaan bergantung atau kurang mandiri atau swadaya.

Program pemberdayaan kaum difabel netra di Kota Banjarbaru dapat berjalan efektif jika dilakukan dengan tahapan dan strategi yang tepat. Dimulai dari pengumpulan data dan identifikasi permasalahan serta kebutuhan para difabel netra di Kota Banjarbaru. Selanjutnya, seluruh *stakeholders*, fasilitator, pemangku kebijakan, institusi pendidikan dan masyarakat dapat bergotong royong dan bekerja sama dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Monitoring dan evaluasi tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan lingkup *enabling, empowering, protecting* yang dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program. Sehingga program-program pemberdayaan kaum difabel netra tidak lagi hanya berkutat kepada bantuan *basic needs*. Mengimplementasikan program pemberdayaan yang betul-betul berorientasi *people centered*, yang mana para difabel netra menjadi subyek pemberdayaan tersebut. Sehingga, tidak ada kekeliruan dalam implementasi program pemberdayaan difabel netra di Kota Banjarbaru yang berujung pada paradoks pemberdayaan masyarakat. Capaian-capaian program pemberdayaan masyarakat hanya menjadi "bias cahaya", tidak benar-benar mampu menjadi penerang (pencapaian kemandirian) bagi difabel netra dalam menjalani kehidupan.

REFERENSI

Ferardy, M. (2018). *Kampung {intar Sebagai Upaya Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Program Kampung Pintar di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)

Hamid, I., & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Livelihood Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *8*(1), 1–23. http://dx.doi.org/10.24235/empower.v8i1.13585

Hikmat, H. (2014). Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat (People Centred Development). Andalsos: Staf Ahli bidang Dampak Sosial Kemensos.

Copyright © 2023 by The Authors

OPEN ACCESS

Helmayuni. (2021, Januari 16). Perbedaan UU No 4 Tahun 1997 dan UU No 8 Tahun 2016. Sentra Terpadu "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta. Retrieved from: https://soeharso.kemensos.go.id/news/topic/198.

Islan, A. (2021). *Peran Persatuan Tunanetra Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Kemenpppa. (2019, Mei 8). Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. kemenpppa.go.id. Retrieved from: https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang.

Kemensos. (2020) Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. Kemensos.go.id. Retrieved from: https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas

Kemenpppa. (2019). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: *Kementerian Pemberdayaan Perempuan* dan Perlindungan Anak.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.

Najiyati, S., Dkk (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Wetlands International – Indonesia Programme. Bogor.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Qasthari, M. N. R. (2017). *Tindakan sosial komunitas bravo for disabilities dalam pemberdayaan penyandang disabilitas* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Soemodiningrat, G. (2002). *Memberdayakan Masyarakat Perencana*. Jakarta: Kencana Nusadwina.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Tentang Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas di Republik Indonesia.

Yemima, Y., & Hamid, I. (2023). Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan Strategis Pemberdayaan Difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31–41. https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.36

Copyright © 2023 by The Authors

OPEN ACCESS